

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha mewujudkan perkembangan tersebut dalam bentuk pembangunan di segala sektor. Hal tersebut meliputi pembangunan di bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Sejalan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta sangatlah diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Keberhasilan pembangunan tersebut akan tercapai apabila adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pembiayaan dana konsumen, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat,

mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian.

Untuk menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyangga dana yang lebih fleksibel dan moderat, daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi.

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Didalam Keppres tersebut menjelaskan bahwa, Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala;”¹

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga pembiayaan pasal 1 angka (6)

dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”² Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Dewasa ini, jenis lembaga pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Peralatan modal perekonomian dunia yang begitu pesat merupakan dampak dari era globalisasi yang menyebabkan perkembangan dunia usaha semakin pesat, sehingga menuntut suatu negara untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya baik secara nasional maupun internasional. Salah satu lembaga pembiayaan yang kita kenal adalah Lembaga pembiayaan konsumen.

Lembaga Pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat dan tidak diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen mudah untuk mendapatkan dana dan atau dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya melalui

² Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 angka (1) dan (2).

lembaga pembiayaan ini dengan sistem perjanjian secara kredit. Perjanjian ini yang sekarang berkembang pesat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya antusias dari masyarakat menengah kebawah. Karena hal tersebut secara nyata telah mampu mewujudkan kesejahteraan yang selama ini dirasa cukup sulit untuk diwujudkan oleh sebagian masyarakat menengah ke bawah. Yang menjadi dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat di bilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.³ Dasar hukum substantif pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen ini diatur didalam Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan konsumen, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga pembiayaan. Dimana dari peraturan-peraturan tersebut masing-masing ditentukan bahwa salah satu kegiatan lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen, serta

³ Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang pembiayaan dalam praktek (Leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti , hal. 164

jual beli antara pemasok dan Konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen. Unsur-unsur Perjanjian pembiayaan konsumen ini meliputi adanya Subjek dan objek perjanjian. Subjek adalah Para pihak yang terkait dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu Pembiayaan Konsumen (Kreditur), Konsumen (Debitur), dan Penyedia Barang (Pemasok, Supplier). Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.⁴

Hal ini dapat dipahami, mengingat tidak sedikit lapisan masyarakat yang mendapat kesulitan dalam memperoleh sumber keuangan *capital equipment* (alat modal) walaupun sumber keuangan tersedia. Perusahaan pembiayaan yang muncul dari adanya kegiatan pembiayaan konsumen tersebut dinilai sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi segala problematika yang ada.

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non bank, mempunyai harapan untuk berkembang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pembiayaan ini nampak semakin populer yaitu dengan terus berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia. Mengingat kegiatan pembiayaan konsumen ini merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini yang sangat menguntungkan menurut segi perekonomian nasional. Kegiatan pembiayaan konsumen ini sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena makin sempitnya pasaran industri yang menyebabkan keresahan bagi para pengusaha akhir-akhir ini.

⁴ <http://adypato.wordpress.com/2011/01/12/pembiayaan-konsumen/>

Hal ini disebabkan adanya persaingan diantara barang sejenis yang semakin meluas. Jika hanya mengharapkan penjualan secara tunai maka akan mustahil apabila akan memperoleh hasil yang maksimal. Karena melihat kenyataan dalam masyarakat dengan kondisi perekonomian saat ini, sangat tidak memungkinkan apabila menggunakan cara penjualan secara tunai. Maka gagasan yang tepat untuk memecahkan masalah seperti ini yaitu dengan jalan penawaran penjualan secara kredit. Dengan munculnya suatu perusahaan masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih lemah.

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, perusahaan pembiayaan yang saat ini diamati oleh sebagian besar masyarakat yaitu perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang kredit kendaraan bermotor . Mengingat fungsi kendaraan bermotor yang dirasakan begitu penting, selain sebagai sarana penunjang kelancaran usaha masyarakat, Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang praktis dan terjangkau bagi masyarakat menengah kebawah .

Di Indonesia ada bermacam-macam nama perusahaan pembiayaan konsumen yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, kehadiran perusahaan ini sebagai suatu solusi yang tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat karena tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian, hal ini yang menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha penyedia kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, dimana angka penjualan yang terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai / kontan. Dalam perjanjian

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada prinsipnya mewajibkan Calon Debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan, kemudian baru akan menjadi milik debitur apabila angsuran atas pembiayaan telah dilunasi oleh debitur.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁵

Kitab Undang-Undang hukum perdata, yang terdapat di dalam pasal 1131 KUH Perdata berbunyi “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan “. Jadi dalam hal ini apabila si debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka semua kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas hutangnya.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA”**.

⁵ Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia?
2. Analisis tentang perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
2. Untuk mengetahui analisis tentang perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.
2. Manfaat praktis

Adapun penelitian berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menenambah wawasan mengenai konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

b. Bagi masyarakat

Dengan membaca adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan masyarakat/pembaca sehingga masyarakat/pembaca mengetahui konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode yang digunakan merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah data dan jenis yang akan dicapai. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika

dan pemikiran dengan jalan menganalisisnya.⁶ Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.⁷

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.⁸ Sehingga penelitian ini diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

⁶ Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004 *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hal 3

⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1991, hlm. 11

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 12.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen

perjanjian yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini yaitu tentang perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Supaya penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasanya. Adapun Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya
 - 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian

4. Obyek dan Subyek Perjanjian
5. Akibat Adanya Suatu Perjanjian
6. Prestasi Dan Wanprestasi Dari Suatu Perjanjian
7. Berakhirnya Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen
2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen
3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
4. Hak Dan Kewajiban Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen
5. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen
6. Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia
- B. Analisis Tentang Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN